

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Pengambilan keputusan adalah bentuk pemilihan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih prosesnya melalui mekanisme tertentu. Dengan harapan akan menghasilkan sebuah hasil yang baik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam bentuk matematis yang mencerminkan hubungan yang terjadi antara factor yang terlibat. Hal yang paling sulit dilakukan setelah keputusan didapat adalah segi penerapannya karena perlu menyakinkan semua orang yang terlibat, bahwa keputusan adalah yang terbaik. (Suryadi K dan Ramdhani A., (1998), Sistem Pendukung Keputusan)

2.1.1 Jenis Keputusan

Jenis keputusan terbagi atas 2 (dua) buah, yang pertama adalah keputusan terstruktur dan yang kedua adalah keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur mempunyai aturan aturan yang jelas dan teliti. Dipakai berulang dapat diprogramkan sehingga keputusan ini dapat didelegasikan kepada orang lain atau komputerisasi. Jenis yang kedua yaitu keputusan tidak terstruktur mempunyai ciri kemunculan yang kadang sifat keputusan yang harus diambil mempunyai bersifat sehingga sifat analisisnya pun baru, tidak dapat didelegasikan, kadang alat analisisnya tidak lengkap dan bahkan keputusan lebih didominasi oleh intitusi (Suryadi K dan Ramdhani A., (1998), Sistem Pendukung Keputusan)

2.1.2 Teori Keputusan

Keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan terpilih sementara yang lain dikesampingkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertimbangan adalah menganalisa beberapa kemungkinan atau alternatif, lalu memilih satu diantaranya

untuk menjadi Keputusan yang dilakukan oleh setiap orang pada umumnya dari waktu ke waktu dan dilakukan secara sadar atau tidak. Untuk mengambil keputusan yang dilakukan secara sadar memerlukan perhitungan yang cermat serta diperlukan pertimbangan, persiapan yang matang serta membuat analisis. Dan sering kali pengambilan keputusan tersebut memerlukan banyak bahan, keterangan dan pendapat orang lain yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan tersebut.

Keputusan berkaitan dengan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian suatu keputusan. Keputusan yang terlalu cepat diambil mungkin akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang dipikirkan oleh manusia. Oleh karena itu yang menjadi masalah adalah kapan keputusan tersebut harus diambil agar yang merupakan ketidakpastian dapat dihindari dan dengan penuh harapan suatu keberhasilan dapat dicapai sebesar mungkin.

2.1.3 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Secara garis besar DSS dibangun oleh tiga komponen besar:

a. Database

Sistem database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari, maupun data dasar (master file). Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi.

b. Model Base

Suatu model yang merepresentasikan permasalahan kedalam format kuantitatif (model matematika sebagai contohnya) sebagai dasar simulasi ataupun pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan (obyektif), komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada (constraints), dan hal-hal terkait lainnya.

c. Subsistem Dialog (User System Interface)

Subsistem dialog adalah fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan user secara interaktif. Melalui subsistem dialog inilah sistem diartikulasi dan diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang

2.1.4 Tahap Pengambil Keputusan

Tahap pengambilan keputusan melalui beberapa fase yaitu (Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran) :

1. *Intelligence* → Tahap ini merupakan proses pelurusan dan pendekatan dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.
2. *Design* → Tahap ini merupakan proses menentukan, mengembangkan dan menganalisa alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah. Menurunkan solusi dan menguji kelayaaan sistem.
3. *Choice* → Tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan ini tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan

2.2 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. (Tunggal, Imam Sjahputra dan Tunggal, Amin Wijaya. 1998. *Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*)

2.2.1 Klasifikasi Tenaga Kerja

Berikut untuk pengelompokan tenaga kerja dapat didasarkan (DR.B.Siswanto Sastrohadiwiryono. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*) sebagai berikut :

1. Berdasarkan penduduknya
 - a. Tenaga kerja
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
 - b. Bukan tenaga kerja
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.
2. Berdasarkan batas kerja
 - a. Angkatan kerja
Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara
 - b. Bukan angkatan kerja
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:
anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela
3. Berdasarkan kualitasnya
 - a. Tenaga kerja terdidik

- b. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.
- c. Tenaga kerja terlatih
- d. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.
Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.
- e. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih
- f. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya

2.2.2 Masalah Ketenagakerjaan

Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia (Zulkarnain, S. (2008). Hubungan Kontrol Diri dengan Kreativitas Pekerja) :

- a. Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

- b. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi

perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

c. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

d. Pengangguran

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.

2.2.3 Tenaga Kerja Honorer

Honorer adalah sebuah status, oleh karena itu anggota honorer adalah orang yang dijadikan anggota khusus oleh suatu perkumpulan karena besarnya jasa orang tersebut (Cardoso, Faustino. 2003. Manajemen sumber daya manusia). Hal terkait dituturkan di situs organisasi.org – bahwa ungkapan istilah anggota honorer merupakan ungkapan resmi dalam Bahasa Indonesia. Kata honorer berasal dari kata benda yaitu honor, honor berarti upah. Lewat situs pencarian arti seperti situs persamaankata.com – kata honor bersinonim dengan nafkah. Oleh karena itu honorer bisa diartikan dengan seseorang yang juga mencari nafkah. Kata honor di sini juga dekat dengan kata honorarium. Berdasarkan dari Kamus Bahasa Indonesia Online bahwa kata honorarium

bermakna upah sebagai imbalan jasa untuk orang tersebut dan nominalnya adalah diluar gaji. Terkait dari arti kata honor, honorer serta honorarium dijelaskan bahwa – kata tersebut berpadan dengan arti upah. Artinya kurang lebih apa yang diorasion oleh para guru honorer di Senayan hari ini pun terkait masalah upah yang belum maksimal. Oleh karena itu, mereka menuntut untuk status pekerjaan dinaikan agar upah berubah menjadi gaji tetap layaknya status pegawai negeri sipil. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Berikut Kategori Honorer :

- i. kategori 1 (K1) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honorinya dibiayai langsung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk diketahui, tenaga honorer yang masuk kategori 1 sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus. Honorer K1 memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS.
- ii. Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga honorer kategori 2 apabila ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Selain itu, tenaga honorer yang diangkat selepas kurun 2005-2008 termasuk ke dalam tenaga honorer kategori 3 (non-kategori). Peluang tenaga honorer kategori 3 menjadi CPNS tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan dua kategori sebelumnya.

2.2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Tingkat Kabupaten Gresik

Perhatikan bagan struktur organisasi pemerintahan kabupaten di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kabupaten

a. Bupati

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas antara lain :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
2. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD).

c. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Tugas sekretariat DPRD antara lain:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

d. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hukum, organisasi, pengelolaan barang daerah, keuangan, kepegawaian, umum dan memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah kabupaten; pengkoordinasian perangkat daerah; penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, keuangan, barang daerah dan umum; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Daerah membawahi 2 (dua) orang Asisten, yaitu: Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) dan Asisten Bidang Umum (Asisten II).

e. Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

f. Kelurahan

Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
3. Memberdayakan masyarakat. Dan menegakkan peraturan daerah
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat.

5. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

g. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Tugas pokok Dinas Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten 12 dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Dasar;
2. Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Kesejahteraan Sosial;
7. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Pendapatan Daerah;
9. Dinas Pertanian;
10. Dinas Perkebunan;
11. Dinas Kehutanan; dan
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

h. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, pengkoordinasi pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati

2.3 Metoda *Multi Atribut Decision Making (MADM)*

Pada dasarnya, proses MADM dilakukan melalui 3 tahap, yaitu penyusunan komponen-komponen situasi, analisis, dan sintesis informasi. Pada tahap penyusunan komponen situasi, akan dibentuk *table* taksiran yang berisi identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria dan atribut. Tahap analisis dilakukan melalui 2 langkah. Pertama, mendatangkan taksiran dari besaran yang potensial, kemungkinan, dan ketidakpastian yang berhubungan dengan dampak-dampak yang mungkin pada setiap alternatif. Kedua, meliputi pemilihan dari preferensi pengambil keputusan untuk setiap nilai, dan ketidakpedulian terhadap resiko yang timbul. Untuk proses perhitungan penyelesaian masalah dengan menggunakan MADM terdapat beberapa metode yang digunakan antara lain :

1. Simple Additive Weighting Method (SAW)
2. Weighted Product (WP)
3. ELECTRE
4. TOPSIS
5. Analytic Hierarchy Process (AHP)

2.3.1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Metode Weighted Product

Metode Weighted Product (WP) menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan (*Kusuma dewi, 2006 Fuzzy mukti atribut decision making*).

- Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi
- Preferensi untuk alternatif A_i diberikan sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij} w_j \quad (1)$$

Keterangan :

S vector adalah proses normalisasi Preferensi

Π adalah Himpunan dari...

I adalah data dari 1,2,...,m

W_j adalah pangkat bernilai positif

Contoh:

Suatu perusahaan di Daerah Pekanbaru ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya.

Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu:

A1 = Panam,

A2 = Marpoyan,

A3 = Rumbai.

Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu:

C1 = jarak dengan pasar terdekat (km),

C2 = kepadatan penduduk di sekitar lokasi(orang/km²);

C3 = jarak dari pabrik (km);

C4 = jarak dengan gudang yang sudah ada (km);

C5 = harga tanah untuk lokasi (x1000 Rp/m²).

Nilai setiap alternatif di setiap kriteria:

Alternatif	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0.75	2000	18	50	500
A2	0.50	1500	20	40	450
A3	0.90	2050	35	35	800

Tingkat kepentingan setiap kriteria, juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu:

1 = sangat rendah

2 = Rendah

3 = Cukup

4 = Tinggi

5 = Sangat Tinggi

Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai:

$$W = (5, 3, 4, 4, 2)$$

Perhitungan bobot dari setiap kriteria:

$$W_i = W_j / \sum W_j \quad (2)$$

W_i = bobot nilai ke- i

W ke-i = nilai dari data ke i

$\sum W_j$ = Total data dari nilai W

Hasil perhitungan sebagai berikut :

$$W_1 = 5 / 18 = 0.2778$$

$$W_2 = 3 / 18 = 0.1667$$

$$W_3 = 4 / 18 = 0.2222$$

$$W_4 = 4 / 18 = 0.2222$$

$$W_5 = 2 / 18 = 0.1111$$

Kemudian perhitungan nilai vektor S dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S_1 &= (0.75^{0.28}) * (2000^{0.17}) * (18^{0.22}) * (50^{0.22}) * (500^{0.11}) \\ &= 2.4187 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= (0.5^{0.28}) * (1500^{0.17}) * (20^{0.22}) * (40^{0.22}) * (450^{0.11}) \\ &= 2.4270 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= (0.9^{0.28}) * (2050^{0.17}) * (35^{0.22}) * (35^{0.22}) * (500^{0.11}) \\ &= 1.7462 \end{aligned}$$

Nilai vektor V yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung sebagai berikut:

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij} w_j}{\prod_{j=1}^n (X_j^*) w_j} \quad (2)$$

V Vektor = Preferensi nilai

$\prod_{j=1}^n X_{ij} w_j$ = Himpunan dari data nilai S vector ke -i

$\prod_{j=1}^n (X_j^*) w_j$ = Total dari perhitungan nilai S Vektor

Berikut Hasil Perhitungan :

$$V1 = 2.4187 / (2.4187 + 2.4270 + 1.7462) \\ = 0.3669$$

$$V2 = 2.4270 / (2.4187 + 2.4270 + 1.7462) \\ = 0.3669$$

$$V3 = 1.7462 / (2.4187 + 2.4270 + 1.7462) \\ = 0.3669$$

Nilai terbesar ada pada V2 sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Marpoyan akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Dalam system Weighted Product ini berupaya mencapai sebuah kelenturan (flexibility) dari sebuah DBMS yang mana mempunyai aspek-, disini didapatkan beberapa contoh kasus yang hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi, dan juga beberapa artikel dari internet sebagai bahan wacana antara lain :

1. Riza Alfita 2014

“Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Produk Unggulan Daerah Menggunakan Metode Weighted Product (WP)” S1/Jurusan Sistem Informasi, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura

Membahas tentang Persaingan produk unggulan daerah semakin ketat seiring dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan industri. Persaingan ini mengakibatkan setiap industri harus lebih jeli dalam

merumuskan strategi kebijakan. Pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas produk unggulan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan diperlukan suatu keputusan yang akurat dan efektif agar tidak salah memilih dan meminimalisir kerugian baik dari segi biaya maupun waktu. Metode Weighted Product merupakan bagian dari konsep Multi-Attibut Decision Making (MADM) dimana diperlukan normalisasi pada perhitungannya. Dengan menggunakan metode Weighted Product, diharapkan dapat dikembangkan software sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh suatu instansi, karena instansi cukup memilih beberapa barang yang akan menjadi alternatif pemilihan dan memberikan nilai bobot pada perbandingan alternatif dan kriterianya, adapun kriteria tersebut adalah omset, tenaga kerja, target pasar, teknologi, spesifikasi, asal bahan baku, jumlah bahan baku.

2. Ariyanto 2012

“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan dengan Menggunakan Metode Saw (Simple additive Weighted) Studi kasus Pamella Swalayan

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Membahas Tentang proses pemilihan karyawan dengan menggunakan metode Saw, dimana untuk proses pemilihan dengan menggunakan kriteria antara lain : kejujuran, taat peraturan, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, kredibilitas dan kerjasama dimana untuk semua data kriteria didapatkan dari hasil penilaian secara objektif untuk proses penilaian. Dan hasil perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode Simple Additive weighted dimana untuk proses perhitungan dengan nilai yang memiliki bobot rata-rata terbaik.